



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BASTIAN DERAJAT PULUNGAN
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK : 220070

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.624.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/144 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/116 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 652.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/146 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 186.000.000
5. Tanah Seluas 119 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/90 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/128 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/2 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 318.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



89.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

182.000.000

4. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.750.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.062.850.000**III. HUTANG** Rp. 10.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.052.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.